



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nama Mata Kuliah	: Hukum Acara Peradilan Pata Usaha Negara
Kode Mata Kuliah	: FHS 315
Bobot SKS	: 2 SKS
Semester	: V
Hari Pertemuan	: 1 s.d. 16
Tempat Pertemuan	: Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.

1. Manfaat Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN;2. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi PTUN (<i>absolute</i> dan <i>relatif</i>);3. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN;4. Mahasiswa mampu menjelaskan subyek dan obyek Sengketa PTUN;5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik Hukum Acara PTUN;6. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan asas-asas Pokok PTUN;7. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan susunan, kedudukan dan wewenang PTUN;8. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemeriksaan PTUN; dan9. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum.
--

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

<p>Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum acara atau hukum formal. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa memahami mekanisme dan tata cara beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Mahasiswa mampu memahami KTUN sebagai pangkal sengketa yang menjadi obyek sengketa TUN, jalur penyelesaian sengketa TUN baik melalui upaya administrasi (nonlitigasi) dan jalur litigasi, dismissal proses (pemeriksaan pendahuluan), beracara di Peradilan TUN dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat, proses pembuktian, dan upaya hukum.</p>

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Metode: Pembelajaran langsung.

Pendekatan: induktif

Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi, *out door* (kunjungan ke pengadilan).

5. Materi Pokok

1. Istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN;
2. Kompetensi PTUN (*absolute* dan *relatif*);
3. Unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN;
4. Subyek dan obyek Sengketa PTUN;
5. Karakteristik Hukum Acara PTUN;
6. Asas-asas Pokok PTUN;
7. Susunan, kedudukan dan wewenang PTUN;
8. Pemeriksaan PTUN; dan
9. Pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum.

6. Bahan Bacaan

1. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;
4. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.
6. Indroharto, *Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
7. Joko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988
8. Marbun, SF., *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
9. Martiman Projohamidjoyo, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia.
10. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.
11. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Press, Jakarta. 1989.
12. Siti Soetami, A. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Aditama, Bandung, 2005.
13. Sri Pudiarmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, 2009
14. Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
15. Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

7. Tugas (20%)

1. Makalah
2. Presentasi
3. Baca Buku

8. Kriteria Penilaian

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang; Item Penilaian;

1. Quis : 10%;
2. Tugas : 20% ;
3. Ujian Tengah Semester (UTS) : 30 %;
4. Ujian Akhir Semester (UAS) : 40 %;

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Mahasiswa dan dosen wajib memakai pakaian yang sopan. Perempuan memakai rok dan jilbab terulur ke dada, dan laki-laki memakai pakaian sopan dan memakai sepatu.
2. Mahasiswa wajib hadir paling telat 15 menit sebelum kuliah dimulai.
3. Bagi mahasiswa yang tidak hadir wajib memberikan kabar melalui komisariss kelas;
4. Mahasiswa harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen.
5. Mahasiswa wajib menjaga ketentraman selama perkuliahan;
6. Dosen dan mahasiswa wajib menjaga kedisiplinan terhadap tata tertib.
7. Dosen dan mahasiswa harus saling menghargai di dalam kelas.

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	a. Penjelasan Kontrak Perkuliahan b. Latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	1	Yanis Rinaldi
2	a. Kompetensi Absolut b. Kompetensi Relatif c. Persamaan dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata	2	Yanis Rinaldi



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	a. Unsur-Unsur PTUN; b. Asas-asas Pokok PTUN	3	Yanis Rinaldi
4	Sumber-sumber Hukum PTUN	4	Yanis Rinaldi
5	Sifat-sifat khusus (karakteristik) Hukum Acara TUN	7	Yanis Rinaldi
6	Obyek Sengketa TUN	5	Yanis Rinaldi
7	Subyek Sengketa TUN	6	Yanis Rinaldi
8	UTS	8	Yanis Rinaldi
9	Susunan dan Kedudukan PTUN	9	Andri Kurniawan
10	Wewenang PTUN	10	Andri Kurniawan
11	Dasar pengujian KTUN dan Pemeriksaan Peradilan TUN	11	Andri Kurniawan
12	Acara Pemeriksaan di PTUN <ul style="list-style-type: none">▪ Singkat;▪ Cepat, dan▪ Biasa	12	Andri Kurniawan
13	Pembuktian	13	Andri Kurniawan
14	Putusan PTUN	14	Andri Kurniawan
15	Upaya Hukum biasa dan upaya hukum luar biasa	15	Andri Kurniawan
16	UAS	16	Andri Kurniawan

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, aka ada pemberitahuan terlebih dahulu.



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.)

(.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi

(Dr. Muazzin, S.H., M.H.)
NIP. 19700208199802001